Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Jawa

Abdul Aziz, Akhmad Shodikin, Mohammad Rana

Dosen Prodi Ekonomi ISlam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, abdulaziz@syekhnurjati.ac.id
Dosen Prodi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Akhmad_Shodikin@syekhnurjati.ac.id
Dosen Prodi Hukum Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Mohamadrana85@syekhnurjati.ac.id

Abstract

Speaking of coastal communities north of Java (pantura), then the first thing that comes to our minds is the fishing community. The fishing community is always an interesting object to study. This is because the condition of the fishing area is in contrast to the natural resources (SDA) of the sea which is owned by the northern coast of Java. The fishing area is always synonymous with poverty and backwardness of the people amid abundant marine wealth. However, this hypothesis is not entirely true, because not all northern coastal areas of Java are in that condition. This is of course because each region has a different policy and attention from the shelter government, but the most important factor is the willingness and determination of the local community within the pantura area to empower themselves.

Keywords: Empowerment, Communities, Coastal, Java

Abstrak

Berbicara tentang masyarakat pesisir utara jawa (pantura), maka hal pertama yang tertuju dalam pikiran kita adalah masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan senantiasa menjadi objek menarik untuk diteliti. Hal ini karena kondisi kawasan nelayan yang bertolak belakang dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) laut yang dimiliki pada kawasan pantai utara jawa. Kawasan nelayan senantiasa identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakatnya ditengah kekayaan laut yang melimpah. Namun hipotesa tersebut tidak sepenuhnya benar, karena tidak semua kawasan pesisir pantai utara jawa berada dalam kondisi tersebut. Hal ini tentunya dikarenakan setiap wilayah memiliki kebijakan dan perhatian yang berbeda dari pemerintah yang menaunginya, namun faktor yang paling penting adalah kemauan dan tekad masyarakat setempat yang berada dalam kawasan pantura untuk memberdayakan diri mereka.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pesisir, Jawa

INTRODUCTION

Dengan sumber daya laut yang melimpah tersebut, membuat sebagian masyarakat yang berada diwilayah pesisir memiliki sumber penghasil utama pada subsektor perikanan. Data Podes 2014, menyebutkan bahwa sekitar 21,16 persen desa/kelurahan yang berada pada wilayah pesisir sebagian besar penduduknya mempunyai sumber penghasilan utama pada subsektor perikanan. Itupun lebih didominasi oleh perikanan tangkap (18,19 persen) daripada perikanan budidaya (2,97 persen).

Banyaknya masyarakat pesisir yang menjadikan subsektor perikanan sebagai penghasilan utama, maka tidak aneh apabila konsepsi masyarakat pesisir sering disematkan dengan profesi nelayan. Walaupun harus diakui, tidak semua masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan. Syatori (2014: 241) dalam penelitian *Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa*

Citemu Cirebon) menyatakan bahwa secara geografis, masyarakat pesisir merupakan suatu masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir, yakni suatu wilayah diantara kawasan darat dan laut.

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Seiring dengan itu, muncul suatu permasalahan berkenaan dengan lingkungan sosial yang kumuh, padat penduduk dan lahan yang sempit, ditambah dengan tatakelola ruang yang timbul karena ketidaksepahaman pemanfaatan akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir, (Taufik 2013: 61-7).

Kondisi masyarakat pesisir bertolak belakang dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Masyarakat wilayah pesisir hidup dalam garis kemiskinan, hal ini berimbas pula kepada kondisi lingkungannya yang terkesan jauh dari kebersihan, dan juga secara kesadaran pendidikan masyarakatnya masih rendah. Upaya mengatasi keterbelakangan yang menghampiri masyarakat pesisir baik secara ekonomi, lingkungan, maupun pendidikan merupakan pekerjaan rumah berbagai pihak, diantaranya adalah pemerintah. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Dalam pasal pasal 63 disebutkan:

> *"Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berke-wajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya".*

Pemerintah berdasarkan undang-undang di atas memiliki kewajiban mengatasi persoalan yang membelit masyarakat pesisir, salah satunya adalah terkait kesejahteraan. Pemerintah harus dapat memberdayakan masyarakat pesisir agar kesejahteraannya meningkat. Pemberdayaan penting untuk dilakukan dengan menjadikan sumber daya manusia sebagai subjek sekaligus objeknya. Sudjana (2004: 264) dalam buku "Ekonomi Rakyat", menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Pemberdayaan melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni adalah salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat pesisir.

Pemberdayaan dan pembangunan memiliki kaitan yang erat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk kemandirian dalam mengatasi permasalahan mereka melalui kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Menurut Sudjana (2004: 264) bahwa upaya peningkatan kualitas hidup diperlukan agar masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka. Arah pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dan lebih cepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan sebagai pembangunan bangsa.

Masyarakat pesisir yang mayoritasnya dihuni oleh keluarga muslim nelayan sebagian besar mengalami hal itu. Misalnya, keluarga muslim di Desa Eretan Kulon Indramayu, Gebang Mekar di Cirebon, Kluwut dan Pulolampes di Bulakamba Brebes sumber utama penghidupan mereka mengandalkan hasil laut. Mereka berprofesi sebagai nelayan sejak turun temurun, nenek moyang mreka rata-rata pelaut. Profesi nelayan sebagai profesi utama yang digeluti oleh kepala keluarga (baca: suami) tentu memiliki resiko, salah satunya adalah dalam segi penghasilan. Penghasilan nelayan yang cenderung tidak menyejahterakan berimbas kepada kehidupan keluarga yang taraf hidupnya serba kekurangan.

LITERATUR REVIEW

Berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir telah banyak penelitian-penelitian yang dihasilkan sebagai suatu fenomena faktual. Hal Ini karena masyarakat pesisir mempunyai sejarah panjang dalam mengisi historical bangsa. Masyaraka pesisir dapat pula disebut sebagai wilayah maritim, sehingga negara kita telah lama disebuat sebagai negara maritim. Oleh karena itu waja jika banyak peneliti yang konsen untuk dijadikan sebagai fokus kajian, misalnya hasil penelitian Arieta (2010: 72) tentang *Community Based Tourism Pada Masyarakat Pesisir Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Pemberdayaan Ekonomi.* Hasil penelitiannya mengungkap bahwa pemberdayaan ekonomi pada masyarakat pesisir dapat difokuskan pada bagaimana mengelola sektor kepariwisataan di kawasan pesisir sangat memungkinkan dan dapat memajukan pembangunan di lingkungannya.

Taufik (2013: 61) dalam *"analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar",* menyimpulkan bahwa adanya hambatan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir disebabkan karena kurang antusiasme dalam mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pelatihan karena dianggap kurang penting dan sulit dipahami serta penyuluhan yang intens dalam rangka pendampingan pembuatan proposal untuk pendanaan merupakan solusi pendampingan yang perlu ditekankan.

Kurniasari dan Reswati (2011), Peneliti Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa pemberdaan ekonomi masyarakat pesisir sangatlah kompleks hal ini bukan saja pada aspek teknis di lapangan melainkan secara regulasi dan ini yang penting belum ada keperpihakan, terutama dalam perundang-undangan. Sedang, hasil penelitian Arviyanthi, Suryaningsih dan Yuniningsih tentang "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Di Kelurahan Mangunharjo Kota Semarang", menyimpulkan bahwa bahwa 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir diupayakan pengembangan kemampuan keterampilan nelayan, 2) Hambatan yang masih dihadapi hingga saat ini adalah masih ditemui sifat ragu dan kehilangan komitmen, 3) Faktor pendukung adanya komitmen, lingkungan politik yang stabil, perda yang tidak memberatkan, masyarakat yang ingin berubah, ada kelompok yang peduli lingkungan, keterpaduan dengan visi dan misi dinas, dan 4) Faktor kunci keberhasilan adanya koordinasi dan kerjasama.

Michel Sipahelut (2010) dalam "*Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara",* juga menggambarkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir perlu 1) strategi perbaikan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Halmahera adalah sebagai berikut: (1) pengembangan akses permodalan; (2) pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan; (3) pengembangan akses pemasaran; (4) penguatan kelembagaan masyarakat pesisir; (5) pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat; (6) pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan; dan (7) pengembangan diversifikasi pengolahan ikan.

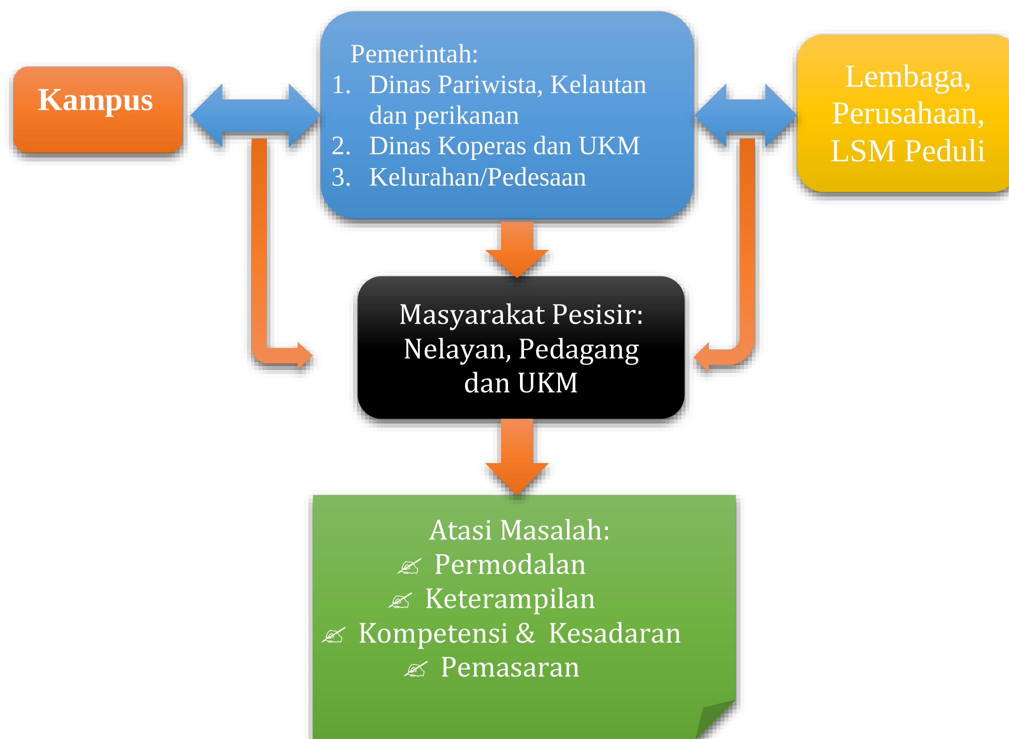
Ningsih dari Direktorat Kelautan dan Perinakan Kementrian Kelautan Republik Indonesia dalam penelitiannya tentang Kajian Kebijakan Kelautan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan konsep pendekatan wilayah, yaitu dengan cara menentukan suatu wilayah di kawasan pesisir yang kondisi masyarakatnya miskin, telah terjadi degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, kelebihan tangkap (*over eksploitasi*), penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan pencemaran. Karena itu, menurutnya perlu ada strategi pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh melalui pendekatan 4 (empat) bina: 1) bina manusia, 2) bina sumberdaya, 3) bina lingkungan, dan 4) bina usaha, yang kaitkan dengan metode partisipatoris (*participatory approach*).

Menurut Ningsih bahwa keempat pendekatan tersebut mempertimbangkan beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir sesuai dengan peringkatnya/prioritasnya harus dilanjut dengan melihat

fokus persoalan, seperti: (a) peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; (b) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dan (3) konservasi dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP).

Adibowo (2014) secara khusus meneliti tentang *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir* (Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) Pesisir. Menurutnya, bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja agar dapat berjalan dengan maksimal, melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak antar lembaga maupun masyarakatnya. Meskipun ada beberapa hambatan yang tidak bisa dipungkiri, seperti: 1) komitmen dari pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, 2) tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan 3) orientasi masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belum pemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuan utama program tetap konsisten dan terjaga.

Menurut Rahmanto dan Purwaningsih bahwa modela pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya di Pesisir Untungjawa perlu dilakukan secara triparted. Lihat gambar 1 berikut ini:



Gambar 1
Model Pemberdayaan Masyarakat

Gambar di atas menjelaskan bahwa model pemberdayaan pesisir mencakup empat faktor, yaitu; 1) faktor perguruan tinggi, 2) faktor pemerintah, 3) faktor swasta, dan 4) masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah, baik pemerintah setempat sampai pada dinas terkait – sangat penting dalam mengambil bagian pemberdayaan masyarakat pesisir. Disamping itu pula keberadaan perguruan tinggi perlu pula berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Dan, tak ketinggalan pula instansi swasta keberadaanya dapat menjadi urgen dalam keikuterstaannya dalam pemberdayaan masayaraiat muslim pesisir.

Menurut Suhendi (2014) bahwa model pemberdayaan masyarakat pesisir paling tidak ada tiga pilihan, yaitu; a) mengintroduksi regulasi pro-rakyat, 2) peningkatan kapasitas swaorganisasi, dan 3) pengembangan sistem produksi-konsumsi. Dari ketiga pilihan model pemberdayaan tersebut, peningkatan kapasitas swaorganisasi lebih sesuai dengan makna filosofi pemberdayaan itu sendiri, dimana proses tersebut lebih menekankan pada peningkatan kemampuan kelompok dalam mengorganisir sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Tetapi proses pemberdayaan masyarakat pesisir perlu memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut:



Sumber: Adi Isbandi Rukminto

Gambar 2
Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Dari tahapatan-tahapan tersebut perlu dilakukan pemodelan pemberdayaan. Menurut Andeas dan Savitri (2006: 29) menjelaskan secara umum model pendekatan yang efektif ada dua, yaitu: 1) model pemberdayaan secara *top-down* (level makro), dan 2) model pemberdayaan secara *botton-up* (level mikro). Hal senada di atas, Mikkelsen (2003: 8) menggambarkan bahwa model micro level dan *macro level* yang dimaksud disamping sebagai bagian dari pendekatan kerja lapangan yang dapat memberikan masukan dalam konteks kebijakan, sedangkan level makro lebih cenderung pada dimensi historis sebagai bagian dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

MHETOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei yang penekanannya pada bentuk eksploratori (*exploratory*, menjelajah/penjajakan). Obyek penelitian adalah keluarga muslim di wilayah pesisir utara Jawa, yaitu di Desa Eretan Kulon, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes-Pulogading Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer melalui teknik wawancara pada keluarga muslim sebagai responden pada masing-masing obyek, dan data sekunder melalui data-data statistik yang didapatkan pada masing-masing demografi

daerah sebagai data penunjang. Sementara jenis data didapatkan dari jenis data kualitatif dan data kuantitatif sekaligus. Dengan demikian, maka teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga analisis kualitatif secara bersamaan, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi. (Silalahi, 2012: 26 dan 339)

RESULT AND DISCUSSION

Tipologi Masyarakat Pesisir Keluarga Muslim Nelayan

1. Tipologi Keluarga Muslim Pesisir Eretan Kulon Indramayu

   Keluarga nelayan di Desa Eretan Kulon pada umumnya sama dengan nelayan-nelayan yang terdapat pada daerah lain, namun keluarga Eretan Kulon, dalam pengamatan penulis secara tipologi dari segi skala investasi modal usaha, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, 1) golongan keluarga nelayan yang memiliki kapal besar dan keluarga nelayan yang memiliki kapal kecil, 2) golongan keluarga nelayan yang memiliki modal besar, biasamya mereka yang memiliki kapal besar. Dengan kapasitas kapal yang besar, maka mereka dapat menampung anak buah kapal dan hasil tangkapan dalam jumlah yang banyak. Disamping itu, masa berlayarnya pun jauh lebih lama. Hal itu berbanding terbalik dengan nelayan yang hanya memiliki kapal dengan kapasitas yang kecil. Dimana dalam hal permodalan mereka tidak besar, begitu pun anak buah kapal maupun hasil tangkapan yang diperoleh, cenderung sedikit.

   Kegiatan menangkap ikan ke laut pada umumnya di lakukan oleh kaum laki-laki, baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih bujangan. Kegiatan tersebut tidak memandang usia, melainkan kondisi fisiklah yang menentukan. Biasannya penduduk laki-laki yang sudah berusia 15 tahun boleh ikut menangkap ikan ke laut. Mereka lebih memilih berangkat untuk menangkap ikan pada sore hari, karena pada waktu ini di anggap sebagai waktu yang efektif dan strategis. Dari kedua anggota kelompok nelayan tersebut, mereka memiliki waktu lama yang berbeda dalam proses penangkapan ikan. Pada umumnya kelompok yang memiliki kapal kecil hanya mencari ikan paling lamannya 2-6 hari dan yang besar bisa mencapai 10 hari sampai berbulan-bulan. Dan untuk menangkap cumi dan sontong biasannya dilakukan oleh kelompok yang memiliki kapal besar, karena dalam pencariannya mereka bisa menghabiskan waktu sekitar satu bulan lamannya.

   Dari segi ekonomi dapat dilihat dari banyaknya jumlah anak-anak nelayan yang mengenyam pendidikan dari mulai sekolah dasar bahkan ada yang sampai jenjang perguruan tinggi, selain itu dari kondisi rumah yang jauh lebih baik di bandingkan dengan rumah keluarga nelayan yang dulu, jika sebagian besar keluarga nelayan yang dulu tinggal di rumah gubuk yang beralaskan tanah, sekarang keluarga nelayan saat ini banyak yang memiliki rumah dengan bangunan yang terbuat dari batu bata dan beralaskan keramik. Selain itu, dari segi agama berkaitan dengan pengaruh agama terhadap golongan keluarga yang telah dijabarkan pada bab dua, bahwasanya keagamaan keluarga nelayan menurut Nottingham termasuk tipe keluarga terbelakang dan keagamaan mereka lebih besar karena kedekatannya dengan alam. Menurut para informan, keluarga nelayan Eretan memang melaksanakan ritual-ritual atau upacara-upacara yang diyakini dapat menolak bala atau menghormati penguasa laut yang biasa dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Upacara-upacara semacam ini di Eretan biasa dikenal dengan sebutan nadranan.

   Dikarenakan peran dari tokoh agama dalam upaya medakwahkan ajaran agama yang mulai direspon oleh keluarga nelayan sehingga para informan mengungkapkan bahwa nadranan memang tidak seharusnya diadakan karena sekarang ini mereka lebih memahami agama dibandingkan sebelunya, sehinga mereka berpendapat bahwa acara ini sebenarnya *tahayul* (musyrik) menurut ajaran Islam, selain itu juga mereka berpendapat bahwa acara nadranan cenderung lebih bersifat hedonisme atau duniawi dan mengambur hamburkan uang saja.

2. Tipologi Keluarga Muslim Keluarga Pesisir Gebang Mekar

Berbeda halnya dengan tipologi keluarga pesisir Eretan Indramayu, keluarga nelayan pesisir Gebang Cirebon berdasarkan hasil penelitian penulis terbagi menjadi beberapa golongan nelayan yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. *Pertama*, nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik biasanya memiliki alat-alat produksi seperti perahu, jaring dan perlengkapan lainnya. Dan golongan nelayan yang tidak mempunyai alat-alat produksi sendiri (nelayan buruh), dalam hal ini nelayan buruh hanya dapat menyumbang jasa tenaganya dalam kegiatan menangkap ikan serta mendapatkan upah yang lebih kecil dari pada nelayan pemilik alat produksi.

Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi melainkan hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas dalam keluarga pertanian nelayan buruh identik dengan buruh tani. *Kedua*, dapat dilihat dari modal usahanya struktur keluarga nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan yang di pandang dari sudut pandang ini dapat di golongkan menjadi dua tipe, yaitu nelayan besar yang memberikan modal investasi dengan jumlah yang banyak untuk kegiatan menangkap ikan dan nelayan kecil yang hanya bisa memberikan modal investasinya dengan jumlah yang sedikit.

Metode penangkapan yang masih bersifat tradisional. Sekalipun alat tangkap yang digunakan tergolong canggih akan tetapi metode pendeteksian pergerakan ikan di dalam laut masih tetap menggunakan cara yang didasari dari pengalaman dan pengetahuan kelautan tradisional. Oleh sebab itu nelayan Gebang masih belum bisa memanfaatkan alat tangkap ikan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal karena metode yang digunakan masih bersifat tradisional.

Keluarga nelayan Gebang dapat memperoleh hasil tangkapan yang relatif banyak, seperti pada saat musim ikan, keadaan demikian belum tentu menjamin bahwa nelayan akan memperoleh nilai tukar (uang) yang memadai. Jaringan pemasaran ikan dikuasai sepenuhnya oleh para bakul. Hubungan antara nelayan dan bakul sangat kuat dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Nelayan menjalin hubungan kerja sama dangan bakul untuk mengatasi kesulitan modal usaha dan memasarkan hasil tangkapan yang mudah menurun kualitasnya. Akan tetapi, dalam hubungan kerja sama tersebut nelayan selalu kurang diuntungkan.

Selain menyediakan pinjaman modal usaha kepada para nelayan, tugas utama bakul adalah menyelenggarakan kegiatan pasar secara terus-menerus agar ikan tetap tersedia untuk konsumen dan menyelamatkan harga ikan ketika hasil tangkapan nelayan sedikit atau berlimpah. Keterlibatan bakul dalam proses produksi dan pemasaran hasil tangkapan nelayan telah menggantikan kedudukan dan peranan organisasi formal, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) Mina. Sebelum koperasi-koperasi tersebut berdiri atau didirikan, bakul telah memainkan peranan ekonomi yang strategis. Oleh karena itu, berdirinya sebuah koperasi formal tidak banyak berpengaruh terhadap pengurangan peranan strategis bakul. Akibatnya, banyak koperasi nelayan yang ada di Gebang harus gulung tikar karena kalah bersaing dengan bakul. Ada KUD Mina di Gebang Mekar justru dianggap oleh nelayan sebagai ancaman terhadap kerja sama nelayan dengan bakul. Karena berbagai kelemahan manajeman, KUD setempat tersingkir dengan sendirinya dan akhirnya tidak berfungsi sama sekali dalam kehidupan sosial-ekonomi keluarga nelayan Desa Gebang Kabupaten Cirebon.

3. Tipologi Keluarga Muslim Pesisir Kluwut

Tipologi keluarga nelayan Kluwut apabila dilihat dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap, maka keluarga nelayan Kluwut dapat dikategorikan kedalam dua kelompok, yaitu kelompok yang memiliki alat-alat produksi sendiri dan

kelompok nelayan yang tidak memiliki alat tangkap atau buruh. Nelayan buruh yang tinggal di Kluwut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mereka mengandalkan sumber daya laut yang memiliki berbagai kekayaan laut, mulai dari ikan, kerang-kerangan *(molusca)*, udang kepiting, dan berbagai sumber daya laut lain yang siap untuk dieksploitasi oleh para nelayan. Tetapi nyatanya masih banyak nelayan buruh yang memanfaatkan sumber daya laut yang berlimpah ini terjerat dalam lingkar kemiskinan, tingkat kesejahteraan yang masih rendah, rumah pemukiman nelayan yang kumuh dan non permanen terletak sepanjang garis pantai serta tingkat pendapatan yang rendah.

Menurut Kusnadi, kemiskinan dan rendahnya derajat kesejahteraan sosial menimpa sebagian besar nelayan tradisional dan nelayan buruh yang merupakan kelompok sosial terbesar dalam populasi keluarga nelayan, tidak terkecuali nelayan di pesisir Kluwut. Ada beberapa karakteristik nelayan buruh yang ada di Kluwut, hal ini sebagaimana yang dikatakan Suhana:

a) Tidak memiliki faktor produksi (kapal dan alat tangkap) dan mengoprasikan alat tanggap yang bukan miliknya.
b) Bermodalkan tenaganya dalam proses penangkapan ikan.
c) Bekerja pada pemilik faktor produksi (juragan/bos).
d) Berpendidikan rendah.
e) Minim dan tidak memiliki informasi akses pasar.
f) Terjebak pada lingkar kemiskinan dan bermukim di desa-desa miskin.
g) Memiliki ketergantungan ekonomi secara permanen terhadap pemilik modal.

Penghasilan keluarga nelayan di Kluwut sangat bergantung dengan kondisi alam. Ada masa nelayan di Kluwut harus berhenti melaut, karena gelombang terlalu tinggi atau angin yang terlalu kencang. Dalam posisi seperti ini tidak ada pilihan lain bagi nelayan Kluwut kecuali menambatkan perahu mereka. Persoalan akan muncul apabila kondisi tersebut berlangsung terus menerus. Sementara itu dapur nelayan harus tetap dapat mengepulkan asap, untuk mempertahankan hidup keluarga mereka.

Pekerjaan rangkap seperti itu merupakan bagian dari pola adaptasi keluarga pesisir Kluwut terhadap kondisi ekosistem yang mereka hadapi. Ketergantungan kepada musim ini semakin besar bagi nelayan kecil yang tidak mampu mengakses terhadap teknologi penangkapan. Terjadinya pekerjaan rangkap ini, selain menandakan besarnya resiko yang dihadapi nelayan dalam menjamin keberlanjutan nafkah, juga mengindikasikan kecilnya pendapatan dari setiap sumber pendapatan yang dimiliki. Oleh karena itu, sangatlah rasional bagi rumah tangga miskin di perdesaan memiliki pekerjaan yang lebih variatif, sebagai sebuah strategi nafkah yang harus dijalankan.

Peran wanita ini merupakan faktor penting dalam menstabilkan ekonomi rumah tangga nelayan, karena pria mungkin hanya menangkap ikan pada musim tertentu saja, sementara wanita bekerja sepanjang tahun. Jadi dapat dikemukakan bahwa salah satu strategi adaptasi yang dapat ditempuh rumah tangga nelayan dalam mengatasi kesulitan ekonomi adalah dengan mendorong istri mereka mencari nafkah. Kiprah istri nelayan ternyata tidak hanya sebatas aspek domestik dan ekonomi semata, tetapi juga lebih aktif dari pria dalam menumbuhkan pranata sosial yang penting bagi stabilitas sosial komunitas nelayan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya peranan wanita pada acara pengajian, arisan, serta kegiatan simpan pinjam yang berperan besar dalam membantu penghasilan nelayan yang tidak pasti.

4. Tipologi Keluarga Muslim Pesisir Pulolampes

Keluarga mulsim di Dusun Pulolampes Desa Pulogading tidak berbeda jauh dengan Desa Kluwut, dimana secara mayoritas mata pencaharian keluarganya adalah sebagai

nelayan. Begitupun dalam pengelompokkan keluarganya nelayannya, terdapat nelayan yang merupakan pemilik kapal, dan kelompok nelayan buruh.

Persamaan tersebut, difaktori salah satunya adalah berada pada wilayah yang sama, yakni Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Namun, terdapat sisi perbedaan diantara keduanya, salah satunya adalah mata pencaharian keluarga muslim Dusun Pulolampes Desa Pulogading yang hanya mengandalikan hasil laut sebagian besar, sedang desa Kluwut disamping mengandalkan hasil laut, juga perdagangan. Sehingga apabila kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk melaut, ataupun cuaca yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan, maka berimbas terhadap penghasilan bagi keluarga nelayan itu sendiri. Hal ini tampak jelas pada desa Kluwut bagian utara.

Hal ini disebabkan karena ketiadaan mata pencaharian sampingan sebagaimana yang dimiliki pada keluarga muslim nelayan di Dusun Pulolampes Maka pada kondisi demikian, kebanyakan keluarga nelayan mengandalkan uang pinjaman dari pengepul ikan. Oleh sebab itu, segala hasil tangkapan yang diperoleh oleh keluarga nelayan disamping digunakan untuk membayar cicilan hutang kepada pengepul, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Imbasnya, secara ekonomi nelayan Dusun Pulolampes Desa Pulogading Bulakamba tidak mampu mensejahterakan keluarga mereka, baik untuk kehidupan sehari-hari mereka, maupun untuk kebutuhan yang lainnya jika hanya mengandalkan itu-itu saja. Karenanya, perlu ada dampingan dari lembaga keuangan khususnya dan atau keterampilan lain, terutama pada keluarga yang ditinggalkan. Misalnya kemampuan olah ikan basah da kering atau lainya, sebagai suatu keterampilan khusus.

Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Keluarga Muslim Nelayan

1. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Nelayan Eretan Kulon Indramayu

Masyarakat pesisir Jawa, terutama yang ada di Desa Eretan Kuloan mayoritas adalah masyarakat nelayan yang 100 % adalah masyarakat muslim, sehingga dapat dikatakan adalah sebagai masyarakat muslim. Dalam melakukan aktivitas keseharian dalam mencari *ma'isyah* (penghidupan ekonomi) untu keluarga. Mereka adalah para nelayan tangkap, dan tentu ada nelayan buruh, serta nelayan bakul. Sebagaimana dikatakan H. Royani, sekretaris KUD Mina Bahari mengatakan bahwa, dengan peran koperasi Mina Bahari, masyarakat Desa Eretan Kulon sebagian besar kepala keluarganya berprofesi sebagai nelayan dapat membantu segala kebutuhan nelayan, bahkan berperan dalam penentuan harga yang ditetapkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sehingga dengan peran aktif KUD Mina Bahari, kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan dapat mengelola penghasilan mereka, tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, namun juga untuk masa depan keluarganya.



Masyarakat muslim nelayan di Desa Eretan Kulon yang laki-laki sebagian besar pergi melaut mencari ikan dengan menggunakan kapal besar maupun kapal kecil. Akan tetapi meskipun bapak-bapaknya atau para laki-lakinya melaut, kelurga yang ditinggal di rumah tetap beraktivitas seperti biasa, meskipun bisa ditinggal selama 2 bulan bagi nelayan yang kapalnya berukuran besar (± 30 Gross Ton/GT) dan sehari semalam bila kapal hanya

berukuran kecil (< 1 GT). Kebanyakan di Desa Eretan Kulon ini kapal berukuran besar, sehingga sekali berlayar bisa sampai 2 bulan. Hal inilah yang oleh Royani dikatakan:

> "*Meskipun mereka meninggalkan keluarga saat pergi melaut, mereka tidak khawatir karena sebelum mereka pergi melaut/berlayar telah dibekali –melalui koperasi ini uang untuk persediaan belanja keluarga selama 2 bulan. Disamping itu, KUD ini dapat menghindari para tengkulan nakal. Artinya, para tengkulak tidak bisa masuk untuk menalangi para nelayan, baik untuk perbekalan untuk operasional selama ± 2 bulan di kapal, maupun untuk keluarga yang ditinggalkannya. Jadi, alhamdulillah keberadaan KUD ini dapat banyak membantu masyarakat keluarga muslim nelayan disini".*

Bahkan koperasi KUD Mina Bahari bukan saja memberikan pembiayaan dengan akad bagi hasil, sebagaimana dalam pembiayaan syariah pada umumnya, melainkan para keluarga yang ditinggalkan – terutama para istri atau ibu-ibu, ketika waktu shalat tiba – saat waktu dhuhur berjama'ah di Mushala depan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan samping KUD. Di saat sedang wawancara dan shalat tiba shalat dhuhur, peneliti diminta untuk berhenti dan langsung ikut shalat berjama'ah. Hal ini sangat menarik bagi peneliti, karena saat waktu dhuhur tiba mereka dapat meninggalkan pekerjaannya. Salah satu keluarga yang ditinggalkan berkata, "*Kitae kang ditinggal suami mayang nang laut ya sambilan kerja apa bae (apa saja.* pen.) *asal halal. Alhamdulilae baka wis waktue adzan dhuhur ya bisa shalat berjama'ah, asale Mushalae parek bari kerjaane (TPI) nang kene".* Artinya, saya yang ditinggal suami melaut bisa sambil kerja apa saja. Akan tetapi alhamdulillah, shalat berjam'ah bisa ikut di Mushola karena dekat dengan TPI tempat saya kerja. Ini menandakan bahwa disamping mereka beraktivitas keseharian ditinggal para suami melaut, secara spiritualitas tidak terbebani. Bahkan ta'at menjalankan kewajiban agamanya, terutama shalat dhuhur berja'amah.

2. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Gebang Mekar Cirebon

Masyarakat nelayan yang ada di Desa Gebang Mekar berdasarkan pengamatan peneliti dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Kelompok *pertama* adalah para nelayan penangkap ikan. *Kedua*, nelayan penggarap tambak, dan *ketiga* nelayan pedagan. Menurut Surip, hampir 90 % penduduk desa Gebang Mekar adalah nelayan penangkap ikan. Menurutnya, "*meraka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap di wilayah tersebut. Walaupun demikian, kondisi kesejahteraan mereka dapat dikatakan buruk karena diakibatkan dari proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif. Nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung ialah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara (bakul). Para bakul inilah yang sesungguhnya menjadi "penguasa ekonomi" di desa*-desa nelayan, khususnya di Desa *Gebang Mekar".*

Dari hasil observasi di lapangan terlihat suasana rame adalah di waktu pagi jam 05.30 sampai sore jam 16.00. Waktu pagi hari nelayan yang berangkat malam akan datang di waktu subuh, sehingga hasil tangkapan ikan dapat dijual secara langsung melalui tengkulak yang sudah siap menerima tangkapan ikan maupun dibawa ke Pasar Gebang. Sementara itu, tangkapan ikan besar dari kapal yang bermuatan lebih dari 20 GT jarang dibawa pulang dan dijual di tempat ini, melainkan berlabuh di Tegal.

Menurut Ipung, bahwa masyarakat desa Gebang Mekar yang berprofesi sebagai pedagang secara umum didagangkan di tempat, meskipun ada juga yang langsung dikirim ke pasar-pasar di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Biasanya, hasil tangkapan ikan laut dari kapal yang bermuatan besar (≥ 20 GT) dapat dikirim ke kota-kota besar dengan menggunakan kendaraan *colt* atau pun truk. Pengiriman ini karena di pasar Jakarta sudah

ada penampungnya, dan biasanya memang sudah pesan terlebih dahulu. Adapun yang dijual di pasar lokal (Pasar Gebang) biasanya ikan yang berasal dari kapal kecil. Akan tetapi dari aktivitas kegiatan masyarakat pedagang di Pasar, sebetulnya ada aktivitas lain pada masyarakat nelayan keluarga muslim Gebagn Mekar yang sejatinya ini sangat disayangkan oleh Pak Surip. Menurtnya, *"masyarakat nelayan di sini sayang tidak ada kebersamaan terutama dalam jual beli hasil tangkapan ikan. Mereka masing-masing mempunyai bakul, sehingga ketika mereka datang membawa hasil tangkapan ikan langsung dibeli sama bakul. Padahal, kita punya tempat pelelangan ikan (TPI). Karena, masing-masing punya bakul dan tempat penjualanannya sendiri, maka TPI yang telah dibuat oleh pihak desa tidak terpakai alias kosong, meskipun ada beberapa pedangang membuka lapak disitu namun sepi."*

Jadi, para bakul atau biasa dikenal dengan sebutan "tengkulak" menjadi andalan dalam "penghidupan" para keluarga muslim nelayan. Karena, biasanya pada saat mau pemberangkatan kapal untuk melaut memutuhkan dana operasional bagi kapal besar bisa mencapai 100 s.d 300 juta sekali jalan selama 2/3 bulan, belum lagi biaya bagi keluarga yang ditinggalkannya. Sementara itu, bagi kapal bermuatan kecil mengalami hal yang sama, sehingga harga ikan tergantung pada kemauan para bakul tersebut. Hal ini disebabkan tidak beroperasinya KUD sebagaimana yang ada di Ereten Kulon. Kalaupun nelayan Gebang Mekar dapat memperoleh hasil tangkapan yang relatif banyak, seperti pada saat musim ikan, keadaan demikian belum tentu menjamin bahwa nelayan akan memperoleh nilai tukar (uang) yang memadai. Jaringan pemasaran ikan dikuasai sepenuhnya oleh para bakul. Hubungan antara nelayan dan bakul sangat kuat dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Nelayan menjalin hubungan kerja sama dangan bakul untuk mengatasi kesulitan modal usaha dan memasarkan hasil tangkapan yang mudah menurun kualitasnya. Akan tetapi, dalam hubungan kerja sama tersebut nelayan selalu kurang diuntungkan.

Fungsi bakul dalam hal ini, selain menyediakan pinjaman modal usaha kepada para nelayan, tugas utama bakul adalah menyelenggarakan kegiatan pasar secara terus-menerus agar ikan tetap tersedia untuk konsumen dan menyelamatkan harga ikan ketika hasil tangkapan nelayan sedikit atau berlimpah. Keterlibatan bakul dalam proses produksi dan pemasaran hasil tangkapan nelayan telah menggantikan kedudukan dan peranan organisasi formal, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) Mina. Sebelum koperasi-koperasi tersebut berdiri atau didirikan, bakul telah memainkan peranan ekonomi yang strategis. Oleh karena itu, berdirinya sebuah koperasi. Akan tetapi keberadaan koperasi ini pun tidak beroperasi secara maksimal ditambah dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tidak berfungsi menjadikan hasil tangkapan ikan tidak dijual secara bersama, melainkan hampir setiap tempat ada TPI-nya.

Karena itu, model pemberdayaan keluarga muslim nelayan masyarakat Gebang Mekar perlu dorong lebih giat dan intensif baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun desa serta lembaga swasta lain yang peduli akan potensi yang besar tersebut. Bahkan terlihat ada destinasi wisata pantai dalam memanfaatkan tempat wisata meskipun sasarannya adalah wisatawan lokal, disamping menggali potensi pantai dengan menggarap hutan mangrufnya. Hal ini terlihat belum tergarap secara masif dan baik. Karena itu, ada baiknya potensi yang ada di Desa Gebang Mekar perlu disatukan atau integrasikan antara umara, ulama dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya.

3. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Nelayan Kluwut Brebes

Hampir sama dengan Desa Gebang Mekar, Desa Kluwut yang terletak di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes merupakan desa yang masyarakatnya nelayan tangkap dan sebagiannya pedagang. Akan tetapi bedanya adalah bahwa masyarakat desa Kluwut dibagi

menjadi dua bagian, yaitu kanan jalan dari arah Cirebon – Brebes mayoritas petani dan kiri jalan mayoritas nelayan tangkap ikan dan pedagang.

Meskipun desa Kluwut tidak dekat dengan bibir pantai seperti halnya Eretan Kulon dan Gebang Mekar, akan tetapi keluarga muslim diblok kiri jalan dea Kluwut ini justru memilih menjadi nelayan tangkap ikan. Namun demikian, sungai yang membentang dari Kluwut sampai Desa Grinting memang kurang lebih panjangnya adalah 8 km dimulai dari desa Kluwut, sehingga mereka karena dekat dengan sungai mata pencaharian melaut menjadi pilihan.

Berdasarkan wawancara dengan Ansori, Kepala Desa Kluwut berujar, *"berhubung desa kami unik dimana sebelah kanan jalan dari arah Cirebon mayoritas berpenghasilan petani dan jauh sampai rel kereta api, sedangkan sebelah kiri adalah nelayan, petani dan pedagang serta berpenduduk padat, terkadang permasalahan seringkali muncul. Misalnya:*

a. *Prosedur pembuatan surat kapal (semacam STNK bagi kapal) rumit Sebagaimana STNK pada kendaraan darat, kendaraan laut juga harus disertai dengan surat-surat identitas. Dan terdapat sekitar 12 surat untuk sebuah kapal yang memiliki masa berlaku yang berbeda-beda sehingga menyulitkan para nelayan untuk beroperasi. Para nelayan berharap, pembuatan dan keberlakuan keduabelas surat itu dapat dilakukan secara bersamaan, sebab keberlakuan yang berbeda membuat kesulitan prosedur dan tentu menghambat operasional kapal dalam mencari ikan.*



b. *Pendangkalan sungai Kluwut Pendangkalan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan belum ada tindakan efektif dari pemerintah. Pendangkalan mengakibatkan sulitnya akses kapal dari sungai (TPI) ke muara (laut), dan mengakibatkan kapal membutuhkan waktu berhari-hari untuk menuju ke laut atau sebaliknya.*

c. *Akses penjualan hasil laut ke Tegal yang jauh Pemerintah Kota Tegal enggan menerima masuknya kapal-kapal dari Brebes disebabkan meningkatnya jumlah nelayan local (dari Tegal sendiri). Terkait dengan dinamika kedua, kesulitan akses ke Tegal dan kesulitan akses masuk ke Pusat Pendaratan Ikan di Kluwut karena pendangkalan menjadi masalah serius dan perlu menjadi perhatian".*

Desa Kluwut juga dikenal dengan para pedagangannya, dimana mereka bukan saja pedagang ikan melainkan pedagang apa saja. Akan tetapi dari penghasilan nelayan dapat mensejahterakan ekonomi keluarga. Menurut Jamburi (Nahkoda), "*alhamdulillah mas penghasilane nyong sampai bisa 20 juta perkali datang, dadine bisa nggo bangun umah. Awale sih, ketika kanggo perahu cilik ya pas-pasan bae, tapi saiki dipercaya karo majikan gawa kapal gede (20 GT), kadie bisa sekali jalan 2 s.d 3 bulan. Memang perbekalan bisa larang, 400 jutaan luwih, tapi balik bisa sampai 1 milyar"* (Alhamdulillah mas penghasilan saya bisa sampai 20/bln, sehingga bisa buat rumah yang bagus. Karena awalnya dipercaya sama bos untuk bawa kapal besar muatan sampai 20 GT, meskipun di laut bisa sampai 2 s.d 3 bulan. Penghasilan ini karena mahal biaya operasioanal sampai 400 juta-an, tetapi bisa pulang membawa hasil 1 milyar).

Kusnadi saudara tua dari Jamburi menjelaskan, "*awit cilik aku diajak karo bapane wayang* (melaut), *tapi peruhe cilik, kadang esuk mangkat balik sore ato mangkat bengi balik esuk. Nggal dina. Pengahasilan pas-pas an sampe saiki, meskipun saiki wis akeh perahu gede. Mungkin nasibe aku karo adine aku beda. Ari penghasilane adine aku akeh, bisa nggo gawe umah sing apik, lamom kita cukupan bae. Tapi alhamdulillah sing awet cilik, mandiri sampai bapane sa iki wis bli mayang maning"* (saat kecil saya selalu diajak oleh ayah untuk ikut melaut, meskipun menggunakan perahu kecil. Berangkat pagi, maka pulang sore dan sebaliknya berangka malam, pulang pagi setiap hari. Penghasilan yang didapat cukup buat keluarga dan buat rumah, beda dengan adik saya yang menggunakan perahu besar jadi penghasilan besar. Tetapi alhamdulillah dari sejak kecil sampai dewasa bisa hidup mandiri, sampai ayah saya tidak menjadi nelayan lagi).

Demikian pula masalah sampah, seringkali menjadi problem bagi masyarakat nelayan karena pemukian yang padat dan sampah-sampah yang disungai menjadikan lahan pembuangan sampah kurang memadai. Dari permasalahan tersebut di atas, model pemberdayaan masyarakat nelayan muslim di Desa Kluwut yang perlu dilakukan adalah; 1) perlu pendampingan dalam pembuatan surat kelayakan melaut agar cepat keluar dan akses mudah, 2) pengerukan kembali sungai Kluwut yang membentang sejauh ± 10 km hingga ke Desa Grinting sehingga kapal-kapal besar yang bertonase > 30 GT bisa masuk dan menjual ikannya di TPI sendiri, 3) pengaktifan kembali lembaga keuangan, seperti KUD untuk pendampingan pembiayaan operasional dan keluarga yang ditinggalkan.

4. Model Pemberdayaan Keluarga Muslim Nelayan Pulolampes-Pulogading

Sama halnya dengan desa Gebang Mekar dan Eretan Kulon, Dusun Pulolampes yang berada di Desa Pulogading Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes adalah dusun yang terletak di utara Brebes. Dusun ini hampir mayoritas keluarga muslimnya berpencaraharian nelayan, baik nelayan tradsional maupun manual. Menurut Sugeng Riyadi, *"Pulolampes merupakan salah satu dusun yang ada di desa Pulogading. Pencaharian mereka kebanyakan nelayan, meskipun ada juga yang nelayan penggarap tambak. Kebanyakan malah tambak punya orang luar, terutama orang Grinting. Dan, alhamdulillah desa kami pernah dikunjungi oleh pemerintah daerah guna mensurvey lokasi untuk dijadikan pelabuhan. Akan tetapi karena sering pendangkalan sehingga belum dapat terlaksana sampai sekarang.*"

Nelayan Dusun Pulolampes Deas Pulogading seluruh ikan yang dihasilkan dapat dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di sini, karena kapal hanya bertonase 12 GT, sampai dengan yang kecil, sehingga bisa ditampung tanpa harus ke Tegal. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi desa setempat. Hasil tangakpan ikan langsung dibawa ke tempat pelelangan ikan yang ada (TPI), dan tentu sudah menunggu para bakuk (tengkulak). Untuk masalah tengkulan/bakul kelihatannya hampir sama dengan permasalahan yang ada di nelayan Gebang Mekar, dan nelaya desa Kluwut. Dimana, tengkulan/bakul akan membeli hasil tangkapan ikan nelayan secara langsung.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dusun Pulolampes tidak seramai dan sesibuk apa yang ada di TPI Desa Ereten Kulon, Gebang Mekar dan Kluwut, karena kurangnya kapal-kapal nelayan, akan tetapi beberapa ibu-ibu baik sebagai bakul maupun lainnya telah lama menunggu kedatangan para nelayan tiba di lokasi. Hal ini berlangsung setiap hari. Dalam hal pemasaran pun ternyata tidak hanya ditempat TPI saja, melainkan ada yang dimasukan ke dalam box besar untuk dikirim ke Jakarta.

Dari kegiatan yang berlangsung di TPI Dusun Pulolampes Desa Pulogading ini kesejahteraan nelayan masyarakatnya terpenuhi. Keluarga muslim nelayan beranjak dari perekonomian prasejahtera menjadi sejahtera. Hal ini dilihat dari misalnya, kapal atau perahu yang digunakannya. Kebanyakan nelayan ini menggunakan perahu besar dengan tonase rata-rata 5 – 15 GT. Disamping itu, keseharian ibu-ibu yang ditinggal di rumah sering kali mengolah ikan basah menjadi ikan kering (ikan digesek). Menurut Tambah, *"Masyarakat nelayan Dusun Pulolampes Desa Pulogading disamping sebagai nelayan juga ada yang menjadi pengerajin ikan petek/gesek (ikan kecil yang dikeringkan) untuk makanan sehari-hari. Terkadang ikan gesek ini bisa dijual pada bakul atau masayarakat sekitar. Akan tetapi lebih banyak dikonsumsi sendiri*".



Dari suasana dan kegiatan para nelayan teserbut di atas, permasalahan yang ditemui adalah adanya perhatian pemerintah desa kepada keluarga muslim yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Pulogading-Pulolampes masih sangat kurang menyentuh. Misalnya, penyuluhan dari dinas terkait (Dinas Peternakan dan Perikanan atau lembaga lainnya) kurang intensif. Demikian pula lembaga pendampingan pembiayaan dalam rangka untuk membantu kebutuhan biaya operasional dan biaya rumah tangga yang ditinggalkan. Ketidak berjalannya koperasi merupakan salah satu indikator dari permasalahan tersebut.

Hal ini sebagaimana hasil survey penulis ke lokasi penelitian, meskipun ada Koperasi Unit Desa (KUD) "Mina Saya Sari", namun belum beroperasi secara maksimal sehingga belum mampu menjembatani antara nelayan dengan bakul. Apalagi di pihak nelayan terdapat dua kateogi, yaitu: 1) nelayan dengan kapal ukuran besar muatannya + 5 – 15 GT (*Gross Ton*), dan 2) nelayan dengan kapal kecil < 5 GT, sehingga bisa berimbas pada adanya penentuan harga yang dikuasai sepenuhnya oleh bakul 10. Tentunya hal tersebut merugikan pihak nelayan itu sendiri, terutama pada pihak nelayan yang ukuran kapalnya kecil. Matinya KUD "Mina Saya Sari" perlu dihidupkan lagi dan diupayakan ada pendampingan dan edukasi dari KUD yang sudah mapan. Karena itu, pemerintah desa dan daerah supaya memberikan perhatian pada daerah-daerah potensial, seperti Pulogading-Pulolampes ini, karena disamping mayoritas masyarakat muslim nelayan juga sebagai petani tambak dan pengolah ikan gesek (kering).

CONCLUSION

1. Tipologi masyarakat keluarga muslim pesisir pantai utara (PANTURA) Jawa ada dua, yaitu; a. tipologi nelayan tangkap ikan dan pengolahanya, dan b) tipologi nelayan pedagang (bakul). Tipologi nelayan tangkap ikan terdiri dari dua karakteristik, yaitu 1) nelayan yang bertugas sebagai anak buah kapal (ABK) dan nelayan sebagai nahkoda (supir perahu), dan 2) nelayan sebagai pemilik kapal/perahu (juragan). Sedangkan tipologi nelayan sebagai pedagang terkadang, mereka sebagai pedangan atau bakul, dan penggarap tambak. Tipologi pertama dan kedua nampak pada keluarga muslim pesisir Eretan Kulon, Gebang Mekar, Kluwut dan Kluwut yang memang sejak dulu menjadi mata pencahariannya. Jadi, tipologi masyarakat nelayan pesisir Jawa seperti Indramayu, Cirebon, dan Brebes kecenderungan masyarakat tipe masyarakat nelayan sebagai pokok pencahariannya dan tipe masyarakat

yang berpola pemukiman padat penduduk (berkerumun/kumpul) dan tradisional dari sisi gaya hidupnya.

2. Pemberdayaan keluarga muslim nelayan di Pesisir Pantari Utara (PANTURA) Jawa lebih terlihat pada model *top-down* dibanding dengan *botton-up*. Model pemberdayaan *top-down* berarti pemberdayaan yang inisiatip datang dari pemerintah daerah atau desa setempat atau lembaga lain yang peduli pada kehidupan masyarakat muslim pesisir. Sementara itu, model pendampingan *botton-up* lebih menekankan pada pemberdayaan yang muncul kreativitas dari masyarakat nelayan itu sendiri. Karakteristik keluarga nelayan yang keseharian melaut, tentu untuk memunculkan ide dan gagasan dalam rangka memberdayakan ligkungan sendiri tidak mungkin muncul bila tidak ada bantuan dari pihak lain. Karena itu, di Ereten Kulon Kabupaten Indramayu, meskipun model pemberdayaan bersifat *botton-up*, tetapi ada hal yang menarik dimana peran Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari lebih aktif dalam peransertanya mendampingi masyarakat nelayan. Berbeda, dengan Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes justru peran KUD yang ada tidak efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dibiayai oleh DIPA LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018. Kami ucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan memfasilitasi, yaitu: Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Dr. Sumanta, M.Ag), Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Dr. Aan Jaelani, M.Ag), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Dr. Bambang Yunarto, M.Si), Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Budi Manfaat, M.Si), Kepala Desa Eretan Kulon Indramayu, dan Sekretaris KUD-nya, Kepala Desa Gebang Mekar Cirebon, Kepala Desa Kluwut-Brebes, dan Kepala Desa Pulogading Brebes. Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan guna dan manfaat bagi pemerintah dalam menentukan model pemberdayaan bagi keluarga muslim di pesisir utara pulau jawa (pantura).

BIBLIOGRAFI

Badiri, Lili, et. al2005. *Zakat & Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri.

Badudu dan Zain, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hasan, A. Rifa'i, dan Achmad, Amrullah (Peny.), 1987. *Perspektif Islam dalam Pembanguna Bangsa*. PLP2M, Yogyakarta.

Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysiis and Practice*. Melbourne: Longman.

Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

Silalahi, Ulber, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sumardi, 1984. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Berkah Pustaka.

Siswijono, Suprih Bambang dan Wisadirana, Darsono, 2008. *Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*. Agritek YPN, Malang.

Sulistiyani, A.T., 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

Suhendi, et.all., 2014. *Pemberdayaan Komunitas Pemulung Sampah Melalui Pengembangan Kelompok Usaha Bersama berbasis Eco-Preuneur di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Karangrejo Kota Metor*. Laporan Penelitian, STAIN Metro.

Sudjana, 2004. *Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Dharma Karsa Utama.

Syatori, A. 2014. *Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon.* Diterbitkan pada Jurnal Holistik Volume 15 Nomor 02, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Theresia, Aprillia, et.al., 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

Taufik, 2013. *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Poleewali Mandar*. Diterbitkan pada Governmet: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6, Nomor 1, Januari.

Widjajanti, Kesi, 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Diterbitkan dalam Jurnal Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011.